



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3521782
LAMAM www.kkp.go.id SUREL djpt@kkp.go.id

Nomor : B.4010/DJPT.1/TU.330/VIII/2024 26 Agustus 2024
Lampiran : Satu berkas
Hal : Undangan *Focus Group Discussion* (FGD) Pendataan Statistik
Perikanan Tangkap

Yth. (Daftar Terlampir)

Dalam rangka penguatan pendataan dan peningkatan kualitas data statistik perikanan tangkap, serta dalam rangka menghimpun masukan Stakeholders terkait, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap menyelenggarakan *Focus Group Discussion* (FGD) Pendataan Statistik Perikanan Tangkap. Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon Saudara dapat hadir/menugaskan pegawai terkait untuk hadir dan memberikan masukan tentang "**Dukungan Stakeholders Untuk Peningkatan Akurasi Pendataan Statistik Perikanan Tangkap**" pada

hari, tanggal : Kamis – Sabtu, 29 - 31 Agustus 2024
waktu : Agenda tentatif sebagaimana **Lampiran 2**
tempat : Bigland Hotel Bogor
Jalan Malabar 1B, Bogor Tengah, Kota Bogor

Panitia menanggung akomodasi dan konsumsi, dan untuk komponen biaya perjalanan dinas lainnya dibebankan kepada masing-masing unit kerja. Konfirmasi kehadiran mohon disampaikan kepada **Sdri. Lola Jaman Sentosa (Telp/WA) 0856-9286-3600**.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Trian Yunanda

Tembusan:
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Lampiran 1. Surat Undangan

Nomor : B.4010/DJPT.1/TU.330/VIII/2024

Tanggal : 26 Agustus 2024

DAFTAR UNDANGAN

1. Rekam Nusantara Foundation
2. Konservasi Indonesia
3. Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN)
4. Yayasan IPNLF Indonesia (YII)
5. Yayasan Pesisir Lestari (YPL)
6. Environmental Defense Fund Indonesia (EDF)
7. Sustainable Fisheries Partnership Foundation (SFPF)
8. USAID Ber-IKAN
9. Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI)
10. WWF-Indonesia
11. Yayasan Pesisir Lestari (YPL)
12. Asosiasi Perikanan Pole & Line dan Handline Indonesia (AP2HI)
13. Asosiasi Pengelolaan Rajungan Indonesia (APRI)
14. ATLI (Asosiasi Tuna Longline Indonesia)
15. Asosiasi Demersal Indonesia (ADI)

a.n. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Trian Yunanda

Lampiran 2. Surat Undangan
 Nomor : B.4010/DJPT.1/TU.330/VIII/2024
 Tanggal : 26 Agustus 2024

**AGENDA TENTATIF
 FORUM GROUP DISCUSSION (FGD)
 PENDATAAN STATISTIK PERIKANAN TANGKAP**

Bogor, 29 – 31 Agustus 2024

WAKTU (WIB)	AGENDA	PENYAJI	MODERATOR
Kamis, 29 Agustus 2024			
14.00 – 17.00	Check in dan Registrasi	Panitia dan Peserta	
17.00 – 19.30	ISHOMA		
19.30 – 21.00	Persiapan internal panitia	Panitia	
Jumat, 30 Agustus 2024			
06.00 – 07.30	Sarapan Pagi	Panitia dan Peserta	Panitia
08.30 – 08.30	Registrasi Peserta	Panitia Peserta	Panitia
08.30 – 08.45	Laporan Ketua Panitia	Katimja Program	MC
08.45 – 09.00	Sambutan Pembukaan dan Arahan	Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap	MC
09.00 – 09.15	Gambaran Pendataan Statistik Perikanan Tangkap dan Kendala yang Dihadapi Saat Ini	Ketua Tim Kerja Program	MC
09.15 – 10.45	Gambaran Standar Pendataan Statistik yang Dilakukan oleh Pemerintah	Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei, BPS	Statistisi Muda
		Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan dan Kehutanan, BPS	
		Pusat Riset Perikanan, BRIN	
10.45 – 11.30	Diskusi Peserta		
11.30 – 13.30	ISHOMA (Sholat Jumat)		
13.30 – 15.30	<u>Hearing and Discussion:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Masukan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah untuk peningkatan akurasi pendataan statistik perikanan tangkap sesuai dengan lingkungan strategis yang dihadapi - Dukungan stakeholders untuk peningkatan akurasi pendataan statistik perikanan tangkap 	Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan	Statistisi Muda
		Akademisi	
		Lembaga Swadaya Masyarakat (NGOs)	
15.30 – 16.00	Diskusi Peserta		
16.00	Penutup	-	MC

WAKTU (WIB)	AGENDA	PENYAJI	MODERATOR
Sabtu, 31 Agustus 2024			
08.30 – 12.00	Penyusunan Rancangan Pemutakhiran Petunjuk Pelaksanaan Pendataan Statistik Perikanan Tangkap	Panitia	Panitia

Minutes off Meeting

Fokus Group Discussion (FGD) Pendataan Statistik Perikanan Tangkap

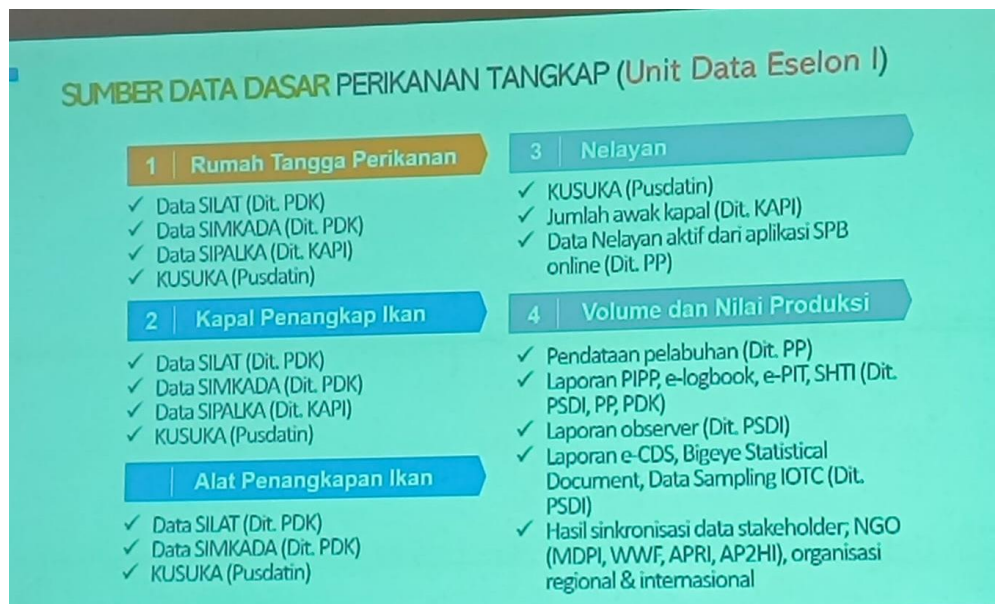
Hotel Bigland Hotel, Bogor, 30 - 31 Agustus 2024

This Meeting conducted by Indonesia MMAF – SETDITJEN - PUSDATIN

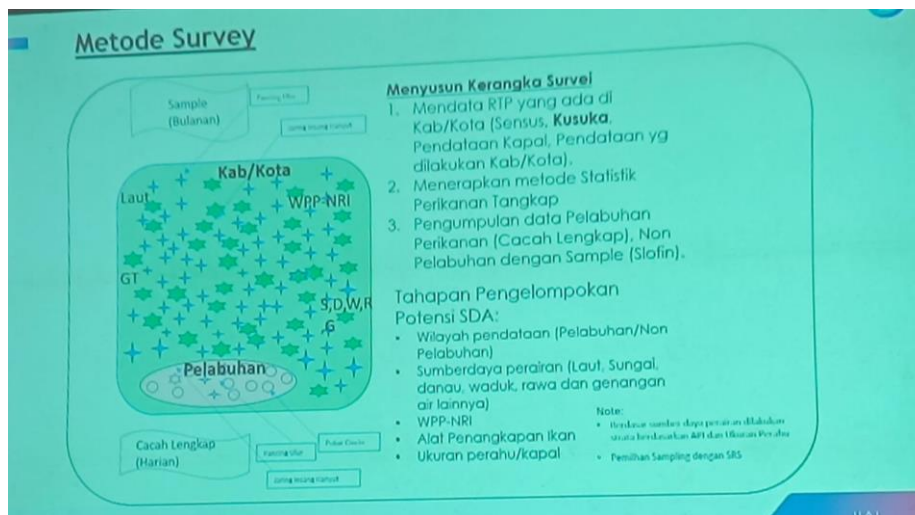
Date of Meeting	:	30 - 31 Agustus 2024
Time	:	09.00 – 15.00 per day
Place/Venue	:	Bigland Hotel, Bogor
Purpose of Meeting	:	Dukungan Stakeholders (Data Provider) Untuk Peningkatan Akurasi Pendataan Statistik Perikanan Tangkap
Participants	:	<ul style="list-style-type: none">- Sekretariat DJPT- PUSDATIN - KKP- Rekam Nusantara Foundation- Konservasi Indonesia- YKAN- YII- YPL- EDF- SFP- USAID BerIKAN- MDPI- WWF – Indonesia- YPL- AP2HI- ADI
Summary of Discussion	:	
<p>Hari 1: Jum'at, 30 Agustus 2024</p> <p>Pembukaan (Laporan Ketua Panitia)</p> <ul style="list-style-type: none">- Data statistik perikanan merupakan salah satu base kebijakan perikanan dan kelautan- Harapan: dapat menghasilkan hasil yang applicable terhadap data dan pendataan statistik perikanan tangkap- Akan didiskusikan soal tantangan, masukan dan dukungan <p>Penyampaian arahan dan pembukaan (Katimja: Anggoro)</p> <ul style="list-style-type: none">- Data statistik di non pelabuhan masih banyak tantangan dari segi teknologi dan ketersediaan data. Data non pelabuhan dikumpulkan oleh pendata di dinas daerah. Data statistik di non pelabuhan menjadi sumber data yang besar produksinya dibanding pelabuhan.- Butuh masukan dari FGD ini agar data statistik perikanan semakin berkualitas.		

Penyampaian Kondisi Eksisting Pendataan Statistik Perikanan Tangkap

- Pendekatan yang digunakan dalam statistik: pelabuhan perikanan dan non pelabuhan (laut dan perairan darat).
- Alur: Gaji enumerator 300rb per bulan per kab hanya 2-3 orang. Bukan pegawai vertikal KKP, tapi dari depnaker. Dari validator akan kirim ke provinsi. Di pusat hanya ada 5 orang validator yang pegang beberapa provinsi. Saat tiba datanya di pusat, kalau ada masalah maka datanya dibalikin lagi. Tantangan: jumlah spesies banyak, jumlah pendata dan personil validator dll sedikit dengan wilayah provinsi dan kabupaten. Di beberapa t4, alat tangkap itu tidak nyambung dengan jenis ikannya, misal di Ambon ada tangkapan tengiri dengan alat tangkap panah dan setelah dicek ternyata benar
- Data utama:
 1. RTP
 2. Kapal dan alat tangkap
 3. Nelayan
 4. Volume dan harga (nilai produksi)
 5. Trip
- Cara menghitung jumlah nelayan: untuk pelabuhan: dari SPB online (jumlah kru).
- Sumber data:



- Setelah validasi kemudian dibandingkan dgn data provider (pelabuhan, observer, port sampling, dll)
- Struktur pendataan: untuk data pelabuhan di sensus (cacah lengkap) dan adapun non pelabuhan strukturnya stratified random sampling berdasarkan API dgn metode Slofin.
- Metode survey; yang masalah adalah alat tangkap yang tidak mendaratkan ikannya di pelabuhan.



- Semua kab/kota mengisi form data dgn item data: no, jenis API, ukuran kapal/perahu (NTP, PTM, MT (<5GT, 5-10, 10-20, 20-30), KM (<5GT, 5-10, 10-20, Jenis perairan (laut, darat), WPP NRI, Populasi, Jumlah, Unit API, Jumlah, sampel-Slofin (25%). Sampel ini hanya dilakukan pada kapal yang tidak mendaratkan ikan di pelabuhan. Karena kalau yg di pelabuhan sudah pasti masuk datanya di pelabuhan (di tanya nelayannya apakah mereka mendaratkan di pelabuhan atau tidak).
- Rumus Slofin:

Contoh:

Non-Fishing Port
Jaring Insang Hanyut, KM < 5 GT, Jumlah Populasi API 1996, MoE=25%

Ukuran sampel yang digunakan menggunakan formula Slovin

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

n = besar sampel
N= besar populasi
e = Margin of error

$$n = \frac{1996}{1 + 1996(0,25^2)}$$

$$= 15,87$$

$$\approx 16$$

- Permasalahan:
 1. Soal indentifikasi alat tangkap identifikasi spesies, laporan hasil penangkapan ikan yg terlalu besar sehingga diduga petugas tidaj melakukan sampling dgn benar => plus perlu ulang-ulang karena petugas sering berganti.
 2. Jumlah SDM dari Ditjen hanya 2 orang per kab/kota dgn coverage pendataan di pelabuhan perikanan, non pelabuhan dan perairan umum daratan

3. Terkait dengan hasil tangkapan dari mix gear masih perlu dilakukan investigasi lebih mendalam karena diduga menyubang potensi hasil tangkapan yg cukup besar pada beberapa alat penangkapan ikan utamanya API tonda dan HL

Sesi Pemaparan

BPS – Direktur Peternakan, perikanan, pertanian Adi Wiriana, M.Si.

- 24.74 juta ton tahun 2023 dari perikanan tangkap dan budidaya
- Standar error/MOI paling tinggi di statistik paling tinggi 5%, bukan 25%.
- Prinsip satu data (Permen nomor 39 tahun 2019 tentang satu data Indonesia). Salah satu prinsip satu data adalah Metadata: informasi dalam bentuk struktur dan pencarian dan memudhakan kompleksitas dari suatu data.
- Jika asosiasi sudah ada data, idealnya di statistik bisa menyadur dari data tsb dan tidak duplikasi
- Pencacahan lengkap: specify needs, design, build, collect, evaluate, disseminate, analyse, process
- Data KUSUKA dari KKP ke BPS sangat membantu sebagai base untuk BPS mengetahui jumlah pelaku usaha perikanan
- Mencerermati perubahan fenomena data (naik-turun) => perubahan iklim, musim dll

Teknis BPS Bu...

- GSBPM – general statistical business process model (standar anajemen data dan metadata international)
- Standar data dapat di cek di <https://indah.bps.go.id>
- Produksi data:
- Menghitung jumlah sampel:

Merancang Pengumpulan Data (1)

Menentukan cakupan unit statistik
 Contoh:
 Unit statistik survei bidang pertanian, perikanan dan kehutanan adalah: agricultural holding, sebagai produsen independen produk pertanian, di bawah manajemen tunggal, mencakup

- Unit Pertanian Perorangan
- Unit Pertanian Berbadan Hukum
- Unit Usaha Pertanian Lainnya

(FAO, 2018, *Global Strategy to Improve Agricultural and Rural Statistics*)

Menghitung Jumlah Sampel

$$n = \frac{N \times Z_{\alpha/2}^2 \times p \times (1-p)}{Z_{\alpha/2}^2 \times p \times (1-p) + N \times (d)^2} \times \frac{deff}{rr}$$

N : Jumlah target populasi
 $Z_{\alpha/2}$: Koefisien reliabilitas (1.96)
 sd : Standar deviasi
 d : Presisi atau persentase margin of error (%)
 $deff$: Design effect
 rr : Response rate
 p : Nilai proporsi, bernilai 0.5

- Di BPS menggunakan Margin of Error (MoE) 5%, KKP menggunakan MoE 25%.

BRIN dan Komnaskajiskan (Prof. Wudianto)

- Catch adalah komponen dari ikan yg bertemu alat penangkap
- Bagi ahli biologi, suatu ukuran upaya penangkapan yg memadai harus proporsional terhadap mortalitas penangkapan sedangkan bisnis berbeda
- Cpue jg dapat digunakan sbg indeks kelimpahan (abundance) dari sumber daya ikan disuatu wilayah
- Effort tidak sederhana, agak sulit menjabarkan dgn kondisi perikanan ultispesies.

- Value = Px Species => berguna untuk penghitungan PIT
- Sampling dilakukan di seluruh lokasi dan seluruh kapal daerah (daerah yang diarsir) namun tidak dilakukan tidak setiap hari. Perlu kombinasi: dilakukan pada 3 lokasi (kapal didalam kota dan pada 10 hari saja (kotak yg diarsir)
- Bagaimana effort menghitung alat tangkap mixing? => alat tangkap lain dianggap effort yang berbeda.
- Laporan perikanan kita di FAO belum 100% diterima, perlu perbaikan-perbaikan.
- Gaji enumerator bisa mempengaruhi motivasi dan bahkan hasil datanya. Perlu peningkatan dan perbaikan
- Pada MSY keuntungan lebih kecil, secara biologi catch maximum. Pada MEY diperoleh keuntungan maximum dengan tenaga yg lebih sedikit. Pada MsocY titik impas/secara ekonomi tdk untung, tenaga kerja maximum
- ikan terbang dulu ada di selat makassar, namun saat ini sudah tidak ada lagi, adanya di Biak. Khawatir kedepan bisa hilang komoditas ini
- Terkait mixing alat tangkap. bagaimana sbnrnya terkait aturan tidak boleh membawa 2 alat tangkap dan pengawasannya seperti apa? Dan apakah alat tangkap utama dan umpan itu dikategorikan sbg alat tangkap berbedakita memahami aturan. Prof Wudi: sbenarnya dilarang. Cilakanya: hasil tangkapan sampingan lebih banyak dari hasil tangkapan utamanya. Misal kapal penangkap tuna maka ketika dia mendartakn lebih banyak cumi daripada tuna, maka cumi dimasukkan dalam alat tangkap lainnya.
- enumerator yg 2 per Kab itu apakah wawancara dan per berapa kali turun lapangan dan di wawancara itu mempertimbangkan musim: musim paceklik, puncak dan normal, karena takutnya pengalinya misal dala setahun ada terus hasil tangkapannya padahal pada rentang 3-4 bulan misalnya musim paceklik yg tdk ada hasil tangkapan utama misalnya.
- terkadang nelayan tidak mendapatkan ikan dalam beberapa kali operasi di bulan2 tertentu, apakah di kondisi tsb itu tetap dimasukkan dipakai jumlah tripnya dan hasil tangkapannya 0 atau tidak perlu didata sama sekali?
- Pada musim paceklik: sebenarnya itu, apakah tidak perlu dilakukan pengumpulan data tuna misalnya, atau tidak perlu sama sekali?
- Effort jumlah kapal adalah paling kasar. Alat tangkap sedikit lebih akurat, jumlah setting lebih akurat lagi,

Diskusi:

Wawan: apakah BPS dan KKP mengumpulkn dan dgn etode yang sama? Jawab: statistik nasional: = statistik dasar = lintas sektor, statistik sektoral – kinerja lembaga, statistik khusus – NGO, diluar pemerintah dll. BPS di statistik dasar: sensus pertanian: beberapa item sama dgn statistik KKP. Di Perikanan: berasal dari pusat2 perikanan: PPI, PPS dan perusahaan perikanan. Yg non pelabuhan itu diserahkan ke KKP. BPS tdk melakukan survey di RTP.

Sesi Siang (IPB) – Pak Azbas

Contoh kasus perikanan Gurita (apakah murni semua gurita? Atau ada sotong, cumi?)

- Dinamika musim berpengaruh pada permintaan pasar gurita. Ada 3 jenis spesies target Gurita blue octopus, webfoot octopus, baby gurita. Jadi kalau dibiliang octopus saja, bisa bias berpengaruh pada SDI dan
- Data produksi tercatat bukan di lokasi produksi tapi sentra peasaran. Misal dari data itu, DKI Jakarta punya produksi perikanan Gurita paling tinggi
- Kapal penangkap gurita sebagian besar belum terdaftar
- Renaksi: pelibatan aktif nelayan, pengepul dan
- Terdapat 4 kategori untuk menentukan jenis perikanan prioritas: Dominan, nilai ekonomis tinggi, rentan.
- Penguatan panel ilmiah perlu spesifik berbicara apa yang mau dikelola dan fokus disitu
- **Sesi diskusi:**
- Prof. Wudi: mengenai LPP WPP.
- Dir PSDI: Timja perairan darat: bgna dengan perairan darat? Sudah dilakukan pendataan dan profiling, sedang di urus pebangunan RPP berbasis ekosistem, pendataannya belum optimal, adakah insight? **Jawab:** terdapat chapter tentang perairan darat di buku yg diterbitkan di komnaskajiskan. Di tenggang selatan banyak progra terkait program perairan darat/umum, bisa komunikasi dgn kadisnya.
- Gurita: jenis ikan tertentu
- Pak Anas: agak sulit untuk memisahkan jenis ikan tertentu saja yang diambil datanya, karena data perikanan itu ada datanya karena memang harus di data
- Kedalaman validasi masing-masing data
- Data NGO biasanya padat ditingkat tapak tapi coveringnya rendah.
- Pak Asbas: Data statistik yg tersedia itu harusnya sdh bisa menghasilkan sarjana, master dan doktor. Pada intinya data ygndikupulkan manfaatnya ada untuk akademisi dan pemerintah. Perlu pemetaan aktivitas2 NGO dan sampai kapan.

Side Meetings	:	
Contact Made	:	
Follow up	:	<ol style="list-style-type: none">1. Data provider memberikan saran data apa dan dimana yang mereka kumpulkan2. Berapa ideal persentase jumlah sampling3. Apakah Slofin tepat digunakan di sektor perikanan?4. Perlu mengetahui kapasitas palka untuk gambaran awal data tangkapan5. Sensus perikanan apakah ada? Iya, masuk dalam lingkup sensus perikanan

		<p>6. Dalam waktu dekat akan ada meeting pendalaman dan NGO/Asosiasi akan diundang, perlu koordinasi erat.</p> <p>7. Perlu dukungan NGO/Asosiasi untuk capacity building enumerator satu data</p> <p>8. Sudah dikembangkan PIPP mobile sehingga data yang dikumpulkan oleh NGO bisa di</p> <p>9. Pusdatin perlu menyiapkan protokol minimum data (standar data) yang dibutuhkan pemerintah</p> <p>10. Kedepan, perlu melihat peluang pemanfaatan AI dalam pengumpulan data</p>
--	--	--

Reported by	:	Herman
--------------------	---	--------

Picture if any	:	
-----------------------	---	--





KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3521782
LAMAM www.kkp.go.id SUREL djpt@kkp.go.id

Nomor : B.4459/DJPT.1/TU.330/IX/2024 17 September 2024
Lampiran : Satu berkas
Hal : Undangan Rapat Penghimpunan Data Stakeholders Tahun 2024

Yth. (Daftar Terlampir)

Dalam rangka rekonsiliasi data statistik perikanan tangkap tahun 2024, perlu dilakukan sinkronisasi data dan informasi dari Asosiasi dan Lembaga Swadaya masyarakat di masing-masing lokasi binaan. Terkait dengan hal tersebut, dimohon kehadiran Saudara dengan membawa data dan informasi yang diperlukan pada rapat yang akan dilaksanakan pada

hari, tanggal : Jumat - Sabtu, 20 – 21 September 2024
pukul : 09.00 WIB s.d selesai
waktu : Agenda tentatif sebagaimana **Lampiran 2**
tempat : Luminor Hotel Bogor
Jalan Cidangiang No. 9, Bogor Tengah, Kota Bogor.

Panitia menyediakan akomodasi dan konsumsi, dan untuk komponen biaya perjalanan dinas lainnya dibebankan kepada masing-masing unit kerja. Konfirmasi kehadiran/pendaftaran peserta agar disampaikan paling lambat hari **Rabu, 18 September 2024** melalui narahubung panitia: **Sdri. Lola Jaman Sentosa (Telp/WA) 0856-9286-3600**.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Trian Yunanda

Tembusan:
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Lampiran 1. Surat Undangan

Nomor : B.4459/DJPT.1/TU.330/IX/2024

Tanggal : 17 September 2024

DAFTAR UNDANGAN

1. Direktur Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei, BPS
2. Kepala Pusat Data, Statistik dan Informasi, Setjen KKP
3. Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan, DJPT
4. Direktur Kepelabuhanan dan Perikanan, DJPT
5. Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan, DJPT
6. Direktur Perizinan dan Kenelayanan, DJPT
7. Rekam Nusantara Foundation
8. Konservasi Indonesia
9. Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN)
10. Yayasan IPNLF Indonesia (YII)
11. Yayasan Pesisir Lestari (YPL)
12. Environmental Defense Fund Indonesia (EDF)
13. Sustainable Fisheries Partnership Foundation (SFPF)
14. USAID Ber-IKAN
15. Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI)
16. WWF-Indonesia
17. Asosiasi Perikanan Pole & Line dan Handline Indonesia (AP2HI)
18. Asosiasi Pengelolaan Rajungan Indonesia (APRI)
19. ATLI (Asosiasi Tuna Longline Indonesia)
20. Asosiasi Demersal Indonesia (ADI)
21. Starlink Resources
22. Ketua Tim Kerja Pengelolaan SDI ZEEI dan Laut Lepas, Dit. PSDI
23. Ketua Tim Kerja Humas dan Kerjasama, Setditjen Perikanan Tangkap
24. Ketua Tim Kerja Program, Setditjen Perikanan Tangkap
25. Statistisi, Pranata Komputer, Analis Data dan Informasi lingkup Tim Kerja Program, Setditjen Perikanan Tangkap

a.n. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Trian Yunanda



Catatan Meeting

- Data perikanan tangkap : pelabuhan dan non pelabuhan
- Non pelabuhan (PUD dan laut)
- Enumerator/validator
- Data perikanan tangkap : rumah tangga nelayan. Kapal dan alat penangkapan ikan, nelayan dan trip, harga ikan.
- Penyampaian data yang dikumpulkan di laporkan kepada pusdatin (khususnya yang di lakukan oleh NGO).
- Tujuan : rekonsiliasi data statistik, sinkronisasi kegiatan pendataan, Update jenis dan tipe pendataan di wilayah masing-masing, memetakan jenis dan tipe pendataan untuk kebutuhan perikanan tangkap.
- Turunan permen satu data sedang disusun. Permen tersebut adalah bertujuan untuk menetapkan data utama, mengusung standar data serta metodologi pengumpulan data.
- Prov Budi : KPBP dimana provinsi sebagai pemegang data.
- Tomi : LPPWP akan di permenkan, di dalam LPPWP ada bahasan mengenai data dan science. Perlu dimasukan unit cleaning house dalam data.
- Logbook simplikasi.
- Rekam : Inisiatif kolaborasi pendataan perikanan (IKAN) aplikasi pendataan REKAM berupa community data base, struktur data berlandaskan kepada form e-BRPL. Citizen science.

- YKAN : Metode pengumpulan data CODRS. Perikanan tuna sudah stop sejak tahun 2023. Pendataan tuna di IAW. Faktor raising sampling individu dari ringkasan sampling data.
- AP2HI : 14 enumerator/staff. Menggunakan metodologi pendataan seperti MDPI.
- Konklusi dari masing-masing provider : standarisasi dari data, minimum variabel yang banyak kepentingan dari masing-masing stakeholder. Penggunaan data dari data masing-masing NGO, agak sensitif sehingga perlu di buat MOU atau PKS demi menjaga kerahasiaan data. Pemetaan lokasi kegiatan demi menghindari respon data dan overlap. Menyatukan sumber data/ integrasi data.
- SFPF : data sosek untuk perikanan rajungan. Mengumpulkan dari data pengepul. Mekanisme pendataan rajungan > nelayan > pengepul > KUB > forkom nelayan tingkat kabupaten > forkom provinsi (DKP dan KKP). Anggota forkom 1654 nelayan rajungan. Mendorong agar pengepul bisa bekerjasama dengan buku bakul, kolaborasi dengan penyuluh perikanan dan mitra lokal. Nelayan rajungan : alat tangkap bubu. Berbeda tiap daerah ada yang menggunakan bubu dan jaring (kasus di rembang). Dibeberapa lokasi saat mendaratkan rajungan sudah dalam kondisi di rebus tergantung jarak penangkapan dan permintaan pengepul.
- Alat tangkap berdasarkan musim
- Apri (asosiasi perikanan rajungan) : Rajungan alat tangkap jaring.
- Starling resources : lampung dan jawa barat. Mengerjakan KPBP rajungan. Musim rajungan sept-Maret. Sumber data : data riset, data pasar, data nelayan.
- Konservasi Indonesia :
- YII
- Kesimpulan BPS :
 - ✓ Semua provider data (NGO dan asosiasi) metode pendaatannya termasuk kategori nonprobabilis yang peluang-peluangnya di sesuaikan dengan kondisi di lapangan.
 - ✓ statistik bisa di gunakan dalam menilai coverage satu lokasi (pelabuhan) bukan wilayah . Data tetap bisa di gunakan sebagai benchmark.
 - ✓ Kebanyak fokus data dari KKP adalah kota/kabupaten besar namun perlu di pikirkan daerah2 yang tidak ada coveragennya.
 - ✓ Walidata perikanan saat ini adalah KKP bukan BRIN